

PARTY SURVIVAL: STRATEGI MERAIH KURSI DI ERA REFORMASI

Party Survival: The Strategies to Achieve Seats In The Reform Era

Asep Nurjaman

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: asepip@umm.ac.id

ABSTRACT

Party struggle in the changing aspiration trigger a new format in a political party known as the catch-all party. Position is the polar dichotomy between the party elite and mass party. This format more pragmatism and rationality as the pillars of a democratic political system. With the principle of pragmatism and rationality is possible for people to think about the politics without cliches, not imprisoned of ideology, so that people are able to address various issues without preconceptions, without distortion idologis, and without the rigidity being partisan.

Keywords: *Political Parties, Pragmatism, Catch-all, Voice*

ABSTRAK

Perjuangan partai dalam menjaring aspirasi yang berkembang, telah melahirkan format baru dalam partai politik yang dikenal dengan *catch-all party*. Posisinya berada di antara kutub dikotomi partai elit dan partai massa. Format ini mengagungkan pragmatisme dan rasionalitas sebagai pilar penyangga sistem politik yang demokratis. Dengan prinsip pragmatisme dan rasionalitas ini dimungkinkan bagi masyarakat untuk berpikir tentang “politik tanpa alur” (*politics without cliches*), tidak menjadi tawanan ideologi, sehingga masyarakat mampu menyikapi berbagai masalah tanpa prakonsepsi, tanpa distorsi idologis, dan tanpa kekakuan bersikap partisan.

Kata Kunci : Partai Politik, Pragmatisme, Catch-all, Suara

PENDAHULUAN

Partai baru di era reformasi banyak yang belum mempunyai basis pemilih yang jelas. Guna bersaing dengan partai mapan, partai baru berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan simpati dari pemilih, termasuk dengan cara praktis pragmatis berupa pembelian suara. Kondisi ini mendorong partai mapan untuk mengimbangi cara yang dilakukan partai baru agar konstituennya tidak lari ke partai lain. Perilaku praktis pragmatis ketika pemilu, berdampak juga pasca pemilu, terutama dalam memperebutkan kekuasaan. Tujuan utama dari kekuasaan bukan untuk mengembangkan fungsi sebagai mediasi kepentingan rakyat dengan pemerintah, namun lebih bagaimana mendapatkan dana

dari negara untuk membiaya partai, termasuk pemenangan pemilu. Perilaku partai politik demikian merupakan ciri dari politik kartel.

Kuskridho Ambardi ketika mengungkap politik kartel menemukan bahwa perilaku partai berbeda dari satu arena ke arena lain. Jelasnya perilaku partai di arena electoral tidak linier dengan arena legislatif maupun pemerintah, yang seharusnya terjadi dalam kacamata Sartori sebagai penerus kepentingan adalah linier, diakibatkan oleh perilaku dinamik elit. Setelah setelah selesai pertarungan di arena electoral, partai politik berusaha untuk berkompromi satu sama lain dalam upaya untuk meraup keuntungan ekonomi yang dibutuhkan untuk menghidupi kebutuhan politik partai.

Secara sederhana, politik kartel bisa dikatakan sebagai kolusi antara dua atau lebih partai untuk mempertahankan diri. Hal ini dilakukan agar partai-partai lain yang berada diluar kelompok mereka tidak bisa mendapatkan akses pada kekuasaan atau mendapat resources yang berasal dari negara. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa ciri utama dari politik kartel adalah “kolusi” untuk mendapatkan privilege dari negara atau pemerintah baik itu beru jabatan atau uang.

Andrew Knapp,¹ yang mengkaji bagaimana partai-partai di Perancis menjadi partai kartel. Ada beberapa petunjuk untuk melihat apakah parta-partai mengembangkan politik kartel, antara lain: partai menunjukkan adanya pelemahan dalam hal orientasi mereka kepada ideology, lebih mengutamakan pencarian dana, bekerja mereka lebih professional, lebih bergantung pada sumberdaya dari pemerintah. Guna membuktikan tidak adanya tautan electoral, yaitu dengan terbentuknya kartelisasi politik, saya akan mengungkapkan beberapa kasus yang berkaitan dengan partai politik dan anggota Dewan dalam upaya menggerus keuangan Negara.

METODE PENELITIAN

Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan terhadap pemilih, serta hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data sekunder akan diperoleh dari lembaga-lembaga yang berhubungan dengan partai, pemilih dan pemilu, berupa berita, keterangan, catatan. dari mulai Dewan Pimpinan Daerah / Cabang (DPD/C) Partai Politik sampai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Data sekunder ini termasuk juga data yang diperoleh dari internet, buku, majalah, koran, tesis dan disertasi.

Dalam rangka pengambilan data di lapangan, penelitian menggunakan tiga teknik

pengambilan data, yaitu: (1) observasi (2) wawancara, dan (3) Analisis dokumen.

Observasi

Tenik pengumpulan data lewat observasi adalah mencoba mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan partai dan pemilih di Kota Malang. Observasi juga bisa menghasilkan penelitian yang valid karena didukung oleh hasil yang ditemukan di lapangan.

Wawancara (Indepth Interview)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data keterangan, atau pandangan, atau pendirian secara lisan dari subjek. Metode wawancara diklasifikasikan oleh Koentjaraningrat (1990) ke dalam tiga golongan, yakni wawancara berencana, wawancara tidak berencana dan wawancara sambil lalu. Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara terbuka dan berfokus. Informan ditetapkan secara purposive berdasarkan teknik *snowball sampling*. Pengumpulan data dimulai dari seorang informan pangkal yang dalam penelitian ini adalah, anggota Dewan, elit politik, dan organisasi massa yang mengetahui karakteristik pemilih secara umum. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan pertama ini diharapkan dapat memberikan petunjuk tentang individu atau kelompok lain yang perlu dan cocok untuk diwawancarai, berkenaan dengan topik penelitian. Alur penelusuran informan berdasarkan teknik *snowball sampling* ini akan berhenti ketika telah terjadi kejenuhan informasi mengenai pokok soal yang hendak diketahui pada informan terakhir. Jadi penentuan sampel informan menggunakan pedoman wawancara.

¹ Dalam Kuskridho Ambardhi, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: PT Gramedia, 2009.

Analisis Dokumen

Dokumen merupakan salah satu media yang merupakan rekaman terhadap proses dan fenomena sosial. Dokumen seringkali mencakup detail hal-hal yang khusus tentang aktivitas hubungan sosial, yang sukar ditangkap melalui observasi. Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen atau arsip yang berkaitan dengan partai politik dan pemilih hasil pemilu 1999 dan 2004. Dokumen akan diperoleh dari lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu, berupa keterangan, catatan, dari KPU Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membangun Partai Catch-All

Dengan banyaknya partai politik yang bersaing, baik dalam pemilu 1999 (48 parpol), pemilu 2004 (24 parpol), maupun pemilu 2009 (38 parpol)² partai politik kesulitan untuk mendapatkan suara yang hanya mengandalkan segmen massa politik yang terbatas. Banyak partai politik pada pemilu 1999 harus gulung tikar akibat kurangnya dukungan untuk memenuhi *electoral threshold*. Begitupun nasib partai politik yang lulus *electoral threshold*, dengan segmen pemilih yang sempit, mengalami penurunan jumlah dukungan pemilih akibat ketidakmampuannya dalam meraih dan mempertahankan simpati pemilih. Kondisi ini telah mendorong partai-partai untuk

² Proses politik yang terjadi di DPR hasil pemilu 2004, pada penghujung masa jabatannya para anggota Dewan, khususnya dari partai kecil, berupaya mendesak agar partainya tidak diferifikasi ulang. Untuk itu mereka mengajukan perubahan sistem *threshold*, dari *electoral* menjadi *parliamentary threshold*. Hasil verifikasi awal, KPU meloloskan sebanyak 34 partai politik baik yang lolos *threshold* maupun verifikasi administratif. Namun keputusan ini dianggap tidak adil dan dianggap melanggar perundang-undangan, oleh karena itu sebagian partai peserta pemilu 2004 yang tidak lolos mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan bahwa empat partai politik berhak ikut dalam pemilu 2009.

memperluas segmen massa pemilihnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Demi memperoleh suara yang lebih besar dalam pemilu, ada kecenderungan partai-partai melakukan pencairan basis ideologi mereka, dengan cara merubah sifat organisasi yang eksklusif menjadi inklusif.³

Partai Nasionalis maupun Partai Islam, menurut I Ketut Putra Erawan (2008). terus berusaha melakukan pembenahan agar dapat tetap survive. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membenahi platform ideologisnya mereka masing-masing. PDIP sangat relevan sebagai partai massa karena banyak pendukung setia (Marhaenis, Soekarno, Nasionalis, dan mungkin kelompok populis), dan secara teoritik sudah berada pada jalur partai massa sejak berdirinya. Namun kenyataan pemilu 2004 telah mendorong elit-elit partai PDIP untuk mengaburkan partai massa.⁴

³ Setelah pemilu 1999, partai politik yang merasa tidak cukup kuat untuk meraih dukungan pemilih dari basis pemilih tradisionalnya, maka mereka berusaha untuk mengembangkan segmen pemilihnya. Salah satu kita agar bisa meraih dukungan pemilih dari luar basis tradisional, partai Islam melakukan pembenahan dalam membangun isu politiknya dengan tidak menonjolkan syariat Islam secara fulgar walaupun tetap tidak merubah jatidirinya sebagai partai Islam. Begitupun partai Nasionalis berusaha untuk menggaet pemilih diluar basis tradisionalnya, dengan cara membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh Islam.

⁴ Di sisi lain, kelompok Islam Tradisionalis melakukan sohpistikasi dalam pendekatan dengan kelompok Abangan. Partai-partai yang semula dikenal "hijau" mulai mencoba untuk menampilkan wajah Nasionalis dengan mereduksi isu-isu penegakan Syariat Islam dan Negara Islam dalam kampanyenya, sebagaimana dilakukan oleh PPP dan PKS. Ketika masih bernama Partai Keadilan (PK), dengan mengusung isu Islam partai ini tidak mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilu 1999, di Parlemen hanya memperoleh 7 kursi. Namun setelah melakukan pembenahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di mana isu yang diluncurkan lebih riil dan menjadi dambaan masyarakat, seperti penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi dengan semboyan "bersih dan peduli", PKS yang pada pemilu 1999 hanya mendapat 7 kursi, pada pemilu 2004 menjadi 45 kursi. Namun sebaliknya dengan PPP, meskipun sudah memperbaharui isu syariat Islam dan Negara Islam dan menggantinya dengan "mendukung" Pancasila, tetap saja stagnan dengan 58 kursi. PBB yang tetap ngotot dengan Syariat Islam juga melorot, dari 13 kursi dalam pemilu 1999 menjadi 11 kursi dalam pemilu 2004. PDI-P yang

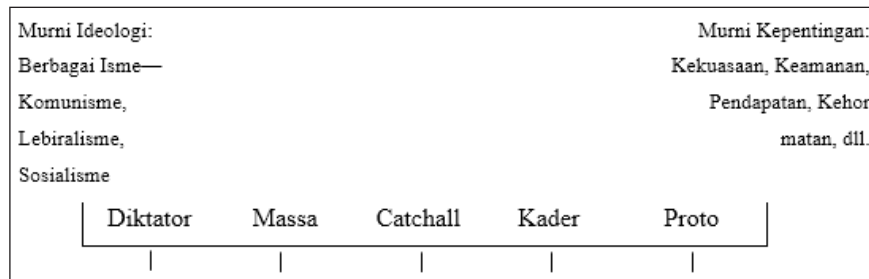
Dengan demikian, demi memperoleh suara yang lebih besar dalam pemilu, ada kecenderungan partai-partai melakukan pencairan basis ideologi mereka, dengan cara merubah sifat organisasi yang eksklusif menjadi inklusif. Perubahan ini membuka kemungkinan bagi partai untuk melakukan reposisi dan redefinisi fungsi mereka yang semakin jelas dan efektif dalam dinamika politik (Katz and Mair, 1955). Partai tidak sekedar berfungsi sebagai pencari legitimasi (perspektif partai elit) atau menyalurkan aspirasi massa (perspektif partai massa). Perubahan ini terjadi karena masuknya perspektif perilaku rasional kedalam wacana perdebatan ilmiah mengenai peran dan fungsi partai politik (Downs, 1957).

Kenyataan tersebut di atas dipengaruhi oleh adanya perkembangan aspirasi politik masyarakat yang membangun kesadaran dari para pelaku politik untuk berpikir bagaimana bisa merangkul berbagai kepentingan yang

unggul dengan 153 kursi dalam pemilu 1999, juga melorot hanya memperoleh 109 kursi di pemilu 2004.

ada. Apalagi hal ini didukung oleh keyakinan LaPalombara dan Weiner (1966), bahwa kegagalan partai politik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berkembang merupakan penyebab utama matinya sebuah partai politik. Dengan demikian banyak partai yang aktif dalam menjaring aspirasi yang berkembang, dan hal ini telah melahirkan format baru dalam partai politik yang dikenal dengan *catch-all party*.

Perubahan ini menurut Riswanda Imawan (2004), membuka kemungkinan bagi partai untuk melakukan reposisi dan redefinisi fungsi mereka yang semakin jelas dan efektif dalam dinamika politik. Partai tidak sekedar berfungsi sebagai pencari legitimasi (perspektif partai elit) atau menyalurkan aspirasi massa (perspektif partai massa). Perubahan ini terjadi karena masuknya perspektif perilaku rasional ke dalam wacana perdebatan ilmiah mengenai peran dan fungsi partai politik.



Sumber: Mark N. Hagovian, Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science, New York and London, Logman Inc., 1978.

Gambar 1. Rangkaian Kesatuan Motivasi Partai Politik

Dalam pandangan Riswanda, terbentuknya *catch all party* di era multipartai, merupakan kelanjutan politik era Orde Baru yang menolak ideologi kiri-kanan, sehingga kedua spektrum ideologi harus hilang. Hilangnya ideologi ini menurutnya justru akan menghancurkan negara seperti yang terjadi di negara-negara sosialis. Untuk melukiskan kondisi tersebut, Riswanda mengutip pernyataan Bell, ‘bahwa bangkrutnya negara-negara sosialis adalah akibat kosongnya makna dikotomi “kiri-

kanan” dalam perspektif ideologi politik. Ia berpendapat bahwa bila kubu tengah terbentuk karena penolakan terhadap kubu “kiri atau kanan”, maka format catch-all party itu sendiri merupakan refleksi dari kehadiran satu ideologi baru.⁵

⁵ Untuk lebih jelasnya lihat, Riswanda Imawan, *Partai Politik Di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 4 September 2004.

Tanpa ideologi terbuka kemungkinan politik mengarah kepada pragmatisme dan oportunisme yang sangat akut.⁶ Logika produsen-konsumen yang merupakan pondasi pasar ekonomi menjadi dasar dalam kebijakan partai, yang menurut Riswanda logika ini mengandaikan bahwa segala pergulatan politik bergantung pada kreatifitas elit dalam mengiring massa politik untuk larut ke dalam jualan politik yang ditawarkan. Selanjutnya

⁶ Hingga saat ini, apa yang dimaksud dengan partai Islam masih ditemukan pemahaman yang beragam. Hal ini sejalan dengan pandangan yang berkembang di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia tentang hubungan antara Islam dan negara yang juga mendapat tanggapan yang beragam. Bagi kalangan akademisi, keragaman pandangan ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Akan tetapi, bagi kalangan awam keragaman ini masih relatif sulit dipahami dan tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan yang berpotensi memicu konflik. Untuk itulah, dalam kajian ini penting dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam dan yang terkait dengan hal ini berikut argumentasi-argumentasi yang melandasinya, agar keragaman pandangan tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam mendapat apresiasi yang proporsional. Pembahasan ini menjadi terasa penting bila dikaitkan dengan posisi umat Islam Indonesia yang menempati jumlah terbanyak di dunia, sekaligus yang memiliki jumlah partai Islam terbanyak pula. Sebagian kalangan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai-partai yang menggunakan nama atau simbol simbol Keislaman. Sebagian yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang menjadikan Islam sebagai azasnya. Sebagian kalangan lagi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang bertujuan memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat Islam, meskipun tidak menggunakan simbol atau atribut Islam, dan masih banyak lagi pendapat tentang hal ini. Dari berbagai pendapat yang berkembang tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam tersebut, paling tidak dapat ditemukan suatu rumusan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Pertama, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang menggunakan nama, azas, tanda gambar, yang terkait dengan Islam. Kedua, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang konstituen utamanya adalah umat Islam. Ketiga, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang program dan tujuannya memperjuangkan kepentingan-kepentingan semua warga negara, tetapi konstituennya adalah umat Islam. Jadi, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang di dalamnya mengandung ketiga unsur di atas. Lebih jelas mengenai karakteristik partai, khususnya partai politik peserta pemilu 1999, lihat Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program, 2004-2009, PT. Kompas Media Nusantara, 2004.

ia mengatakan bahwa bila kalkulasi elit ini terjadi dalam sitem politik di mana personifikasi institusi masih berlaku, maka format catch-all party berpotensi melahirkan oligarki dalam tubuh partai itu sendiri. Dan ini bertentangan dengan jati diri dari partai politik sebagai pilar demokrasi.⁷

Kenyataan tersebut di atas dipengaruhi oleh adanya perkembangan aspirasi politik masyarakat yang membangun kesadaran dari para pelaku politik untuk berpikir bagaimana bisa merangkul berbagai kepentingan yang ada. Apalagi hal ini didukung oleh kenyataan bahwa kegagalan partai politik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berkembang merupakan penyebab utama matinya sebuah partai politik.

Dengan demikian banyak partai yang aktif dalam menjaring aspirasi yang berkembang, dan hal ini telah melahirkan format baru dalam partai politik yang dikenal dengan *catch-all party*.⁸ Posisinya berada di antara kutub dikotomi partai elit dan partai massa. Menurut Riswanda, format ini mengagungkan pragmatisme dan rasionalitas sebagai pilar penyangga sistem politik yang demokratis. Dengan prinsip pragmatisme dan rasionalitas ini dimungkinkan bagi masyarakat untuk berpikir tentang “politik tanpa alur” (*politics without cliches*), tidak menjadi

⁷ Untuk lebih jelasnya lihat, Riswanda Imawan, Partai Politik Di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 4 September 2004.

⁸ Dasar pertimbangan utama kenapa partai politik tergoda untuk membangun catchall party adalah keinginan untuk memenangkan pemilu. Baik catchall party yang berbasis partai massa maupun partai kader sama-sama punya pandangan bahwa untuk memenangkan pemilu harus menangkap semua atau berbagai kelompok kepentingan. Hal ini dilakukan dengan cara memperlunak ideologi mereka agar dapat masuk ke dalam berbagai kelompok. Semua catchall party menjanjikan kondisi yang lebih baik bagi pengusaha, upah dan jaminan sosial yang lebih baik bagi pekerja, harga terjangkau dan dukungan pada petani, jaminan hari tua, bantuan terhadap pengusaha kecil, pendidikan dan lapangan kerja yang lebih baik bagi pemuda, dan sebagainya. Lebih jelasnya, lihat Mark N. Hagopian, Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction to Political Science, New York and London, Logman Inc., 1978.

tawanan ideologi, sehingga masyarakat mampu menyikapi berbagai masalah tanpa prakonsepsi, tanpa distorsi ideologis, dan tanpa kekakuan bersikap partisan.

Dalam rangka merealisasikan ambisi parpol membangun partai *catchall*,⁹ beragam cara dilakukan, tidak hanya oleh partai yang punya segmentasi pemilih Santri (Islam) namun juga partai yang punya segmentasi pemilih Abangan (Nasionalis). Untuk merambah massa berideologi berbeda, beberapa partai Islam dan Nasionalis mencoba mengubah citra diri. PDI-P membentuk Baitul Muslimin untuk merebut simpati generasi muda Islam. PAN kian bergeser ke arah Nasionalis, sementara PBR mengawinkan Islam dan sosialisme. Begitu pun PPP dan PKS berupaya melunakan isu syariat Islamnya, dan hanya PBB yang secara konsisten mengampanyekan Syariat Islam. Semua pergeseran itu akan membawa konsekuensi politik para pendukung Tradisionalnya. Hal ini didukung oleh hasil temuan lapangan, dimana segmentasi pemilih pada pemilu 2009 sudah mengalami perluasan, karena hampir semua partai telah keluar dari basis tradisionalnya baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.

Memperluas Segmen Pemilih

Melakukan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Dan Ekonomi

Ketiadaan partai yang programatik telah membuat partai politik “kebingungan” merubah orientasi atau perluasan segmen

⁹ Partai jenis ini di permukaan hampir serupa dengan Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai *Catchall* mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada kemenangan Pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Partai *Catchall* juga sering disebut sebagai Partai *Electoral-Professional* atau Partai *Rational-Efficient*. Namun bergesernya posisi ideologis partai politik akan mengakibatkan hilangnya identitas masing-masing partai politik, bisa jadi setiap partai politik punya isu dan bahkan program yang sama sehingga tidak ada preferensi yang akan dijadikan dasar dalam menentukan pilihan politik.

pemilih dengan mekampanyekan program-program partai. Dampak dari itu semua, strategi partai politik dalam memperluas basis segmen pemilih, dilakukan dengancara membuat program partai yang bersifat karikatif dan bahkan pembelian suara (*votes buying*)

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, aspek kemasyarakatan menjadi bagian terpenting dalam komunitas masyarakat di pedesaan.¹⁰ Tidak hanya dalam kehidupan keseharian dalam berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama mereka, namun juga menjadi indikator serta tolak ukur bagi kehidupan politik. Walaupun dalam masyarakat di Malang Raya kerukunan, kebersamaan masih menjadi bagian dari tata nilai yang mereka anggap baik, namun dalam prakteknya aspek ekonomi sedikit demi sedikit telah mengikisnya. Dalam acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, khususnya tentang kegiatan pembangunan di lingkungan yang membutuhkan kerja bersama (gotong royong), tidak semuanya sadar untuk ikut karena dianggap tidak ada uangnya. Akan tetapi kalau ada kegiatan yang sifatnya mendapatkan imbalan, masyarakat banyak yang rebutan dan bahkan menjadi bahan pertentangan di antara mereka.¹¹

¹⁰ Hasil observasi langsung pada masyarakat pedesaan di wilayah Malang Raya, khususnya masyarakat di Dusun Caru Desa Pendem Kota Batu yang pada umumnya masyarakatnya berada dalam starta ekonomi menengah ke bawah. Aspek kemasyarakatan sangat menonjol di wilayah ini, sebagai contoh dalam acara-acara sosial, seperti pernikahan, kematian, maupun acara-acara adat seperti bersih desa maupun peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional menunjukkan adanya keterlibatan yang masif dari seluruh masyarakat.

¹¹ Dampak dari berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat karikatif maupun pelantrofi sedikit banyak telah melunturkan aspek sosial masyarakat, khususnya tanggung jawab terhadap pembangunan lingkungan. Dari hasil pengamatan langsung, ketika melaksanakan kegiatan pembangunan plesengan yang ada di kampung Jengglong, Dusun Caru, Desa Pendem, Kota Batu, banyak warga yang enggan untuk turut serta dalam kegiatan tersebut karena dianggap ada bantuan dana. Oleh karena itu mereka tidak mau ikut gotong royong kalau tidak ada bayarannya.

Sementara dalam kalangan Santri, aktivitas yang mereka lakukan sering berkaitan dengan Masjid atau Langgar. Kelompok Santri ini, apabila sudah menjadi bagian dari komunitas yang bergelut dalam bidang keagamaan, seperti pengajian rutin, maupun acara-acara lain seperti mendoa'kan arwah leluhur yang sering dibacakan setiap Kamis dan Jum'at pagi, menunjukkan ada keengganan untuk terjun ke dalam kegiatan yang terkait dengan lingkungan seperti kerja bakti.¹² Kondisi tersebut berimplikasi pada aktivitas di luar yaitu politik.¹³

Setiap kegiatan yang akan melibatkan warga, maka jangan harap akan berhasil atau didukung apabila tidak ada nilai ekonominya. Baik itu kegiatan kampanye maupun pemilu, masyarakat memandang tidak ada gunanya jika tidak ada *reward* ekonomi bagi mereka. Lebih jauh, jangan harap ada calon yang

¹² Aktivitas keagamaan yang mereka lakukan, juga tidak lepas dari aspek-aspek ekonomi. Dalam acara pengajian rutin yang dilaksanakan setiap Jum'at, warga sekitar Masjid atau Langgar selalu memberikan makanan dan minuman "jajanan" untuk mereka yang mengaji. Dan acara mendoa'kan arwah leluhur, ternyata setiap keluarga yang akan minta dibacakan ditarik sejumlah uang. Untuk satu orang yang telah meninggal dipungut dua ribu rupiah dan selebihnya seribu rupiah. Artinya, apa yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya baik sosial maupun agama selalu ada motif ekonomi dibalik apa yang mereka kerjakan. Hasil pengamatan, *ibid*.

¹³ Anggota masyarakat yang suka tahlilan, yasinan dan kegiatan keagamaan lain banyak yang memilih PKB, akan tetapi kalau PDI-P dan Golkar berupaya untuk meraih simpati dengan cara memberi bantuan sumbangan bisa saja mereka memilih Golkar atau PDI, kecuali PAN. Para pemilih Santri Tradisional agak sulit memilih PAN karena PAN dianggap identik dengan Muhammadiyah. Di tingkat *grassroot*, Muhammadiyah dianggap sebagai agama baru, atau Islam murni yang secara praktik keagamaan banyak yang tidak bisa diterima oleh warga NU di tingkat *grassroot*, sebagai contoh orang NU sering melakukan tahlilan, kajatan dan berbagai ritual lain yang umumnya melibatkan tokoh agama lokal yaitu kyai. Sementara orang Muhammadiyah tidak mengenal tahlilan, yasinan, dan berbagai kajatan lainnya, padahal dalam konteks masyarakat NU kegiatan-kegiatan itu tidak melulu urusan keagamaan tetapi juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial, dimana kyai sebagai pemimpinnya. Dan umumnya para kyai yang menjadi tokoh agama di tingkat *grassroot* adalah mereka yang mempunyai kedekatan dengan tokoh-tokoh PKB atau sekaligus mereka juga menjadi pengurus PKB.

akan dipilih apabila calon itu tidak dikenal secara dekat oleh masyarakat walaupun calon itu punya kapabilitas dan kredibilitas baik tanpa adanya pendekatan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Disamping itu, jangan harap ada calon yang dipilih oleh kelompok yang secara ideologis berbeda. Bagi masyarakat Abangan sangat sulit untuk menerima seorang Santri menjadi calon dari partai Abangan. Begitupun bagi kalangan Santri sangat sulit menerima calon dari kelompok Abangan untuk menjadi calon dari partai Islam.¹⁴

Kenyataan pada pemilu 1999 dan 2004 masih adanya calon yang punya kapabilitas dan kredibilitas baik dan secara kultur berbeda dengan kultur partainya, tidak lain karena masih dipakainya nomor urut dalam sistem pemilu. Masyarakat tidak melihat orang yang akan duduk di parlemen atau calon anggota legislatifnya, namun hanya melihat pada partai yang akan mereka coblos. Pada pemilu 1999 dan 2004 banyak calon yang sebenarnya tidak jelas asal-usul serta *treck record*-nya namun karena euphoria masyarakat akan perubahan, lantas masih adanya keyakinan bahwa pemilu itu diwajibkan seperti jaman Orde baru, maka partisipasi masyarakat dalam pemilu cukup tinggi. Namun sekarang ini, apabila partai politik tidak melakukan pendekatan khusus berupa penguatan ideologis, maupun pendekatan bersifat sosial ekonomi jangan harap partai tersebut akan mendapatkan suara yang signifikan. Begitupun partisipasi pemilih, apabila partai tidak mampu meyakinkan konstituennya, walaupun mereka tetap mengidentifikasi dirinya sebagai partai tersebut, tapi dukungan yang mereka berikan belum tentu menjadi suara karena bisa saja mereka akan menghanguskan suaranya dengan cara tidak mendatangi bilik suara.

Menyikapi realitas sosial kemasyarakatan yang terjadi, para elit politik berusaha untuk bisa menyesuaikan

¹⁴ Hasil observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat pemilih selama penelitian ini dilaksanakan di wilayah Malang Raya.

dengan kenyataan tersebut untuk dapat meraih simpati dalam memenangkan pemilu. Aktivitas yang dilakukan oleh elit politik, dalam mensikapi realitas sosial kemasyarakatan tersebut, dilakukan dengan cara membangun silaturahmi kepada masyarakat. Hubungan yang dibangun tidak lepas dari kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan hajat masyarakat. Disamping melakukan silaturahmi dan kegiatan sosial kemasyarakatan, para elit juga berusaha melakukan pendekatan ke lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kelompok masyarakat. Kunjungan ke lembaga-lembaga ini, di lapangan ditunjukkan dengan melakukan silaturahmi ke tokoh-tokoh agama yaitu kyai, ustad yang dianggap punya basis massa besar. Ukuran besar kecilnya massa yang dimiliki tokoh agama bisa dilihat dari besar kecilnya pesantren dan santri yang ada serta sudah berapa lama pesantren tersebut berdiri.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, partai-partai yang sukses meraih suara signifikan tidak lepas dari konsekuensi ideologis, sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Walaupun ada hal lain yang menurut saya, keluar dari alur itu berkenaan dengan partai yang memperoleh suara karena figur, seperti Partai Demokrat dengan figur Soesilo Bambang Yudhoyono yang sekarang jadi Presiden.¹⁵ Walaupun sebenarnya di antara masing-masing partai yang besar selalu ada figurinya seperti Gus Dur di PKB, Amin Rais di PAN, Megawati di PDIP, namun itu semua berkaitan dengan simbol personal ideologis yang diusung dan masyarakat menjadikannya dia sebagai representasi / simbolisasi dari ideologi atau kelompok mereka.

Partai Keadilan Sejahtera yang pada pemilu 2004 telah mengejutkan kontelasi politik nasional, ternyata keberhasilan

¹⁵ Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan figur dari kalangan militer, pada pemilu 2004 membidani lahirnya Partai Demokrat. Dengan popularitas yang dimilikinya, Partai Demokrat dapat meraih suara 7,2% yang sekaligus menghantarkannya menjadi Presiden pertama yang dipilih secara langsung.

mereka tidak lepas dari dijalankannya kedua hal tersebut yaitu penguatan ideologis dan pendekatan sosial ekonomi. PKS yang didukung kalangan intelektual muda di kampus-kampus, khususnya di kampus negeri seperti Unibrau, Universitas Negeri Malang, STAIN Malang tidak putus melakukan kaderisasi dengan Tarbiyah-nya sebagai dasar penguatan ideologi. Disamping itu, kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya sosial dan ekonomi juga mereka jalankan. Banyak kader-kader PKS turun ke desa-desa hanya untuk memberikan bantuan berupa pengobatan gratis ataupun bantuan sembako. Banyak masyarakat yang terkesan kepada PKS karena aktivitas sosialnya yang dilakukan oleh kader-kadernya. Tidak jarang, jika terjadi bencana di suatu desa, para kader PKS menjadi kelompok yang pertama dalam memberikan bantuan tanpa memakai atribut partai. Ketika mereka tahu bahwa yang melakukan pengobatan gratis, yang melakukan bantuan sembako adalah kader-kader dari PKS, warga yang dibantu serta merta dalam pemilu memberikan dukungannya kepada PKS.

Bagi yang memilih Golkar, banyak di antara mereka yang telah menikmati keuntungan dari Golkar seperti pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air minum, koperasi dan lain lain. Oleh karena itu untuk wilayah-wilayah yang secara ekonomi berkembang seperti di daerah Pujon yang mempunyai koperasi untuk petani, khususnya koperasi susu sapi sangat fanatik mendukung Golkar. Disamping itu memang para anggota dewan dan petinggi partai di Golkar mempunyai kelebihan sumber daya manusianya. Hal ini telah menjadi kelebihan dari Golkar untuk mendapatkan suara cukup signifikan dalam setiap pemilu. Di sisi lain, akibat monopolitisasi partai politik yang mengharuskan PNS memilih Golkar juga telah berdampak pada dukungan pemilih pasca Orde baru. Sebagian pemilih yang bekerja sebagai PNS, dalam setiap pemilu pasca reformasi memberikan pilihan

politiknya pada Golkar. Dengan strategi sekasur, sedapur, sesumur sangat efektif menggalang massa di akar rumput untuk kesuksesan Golkar dalam memenangkan pemilu. Disamping itu, elit politik Partai Golkar juga terus melakukan berbagai pendekatan sosial ekonomi sebagai wujud dari kepedulian mereka kepada masyarakat kalangan bawah, dengan cara pengobatan gratis, sembako murah, sekolah gratis, bedah rumah, pemasangan paving di jalan warga, perbaikan jalan, pembangunan pos kamling.

Berbeda dengan kasus PKS dan Golkar, PKB pada pemilu 2004 mengalami penurunan jumlah suara yang cukup besar. Menurut saya, disamping PKB yang sering dilanda konflik, menurunnya suara PKB diakibatkan oleh perilaku elit partai yang hanya mengutamakan pendekatan keagamaan, sementara lalai dalam memberikan kontribusi sosial ekonomi pada konstituennya. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa PKB lebih sering berhubungan dengan tokoh agama secara langsung ketimbang turun kepada masyarakat. Para tokoh agama seperti kyai, Ulama, maupun ustadz banyak yang menjadi mediator antara tokoh politik dengan masyarakat, atau menjadi juru kampanye bagi PKB. Tampaknya sudah menjadi kewajiban moral bagi sebagian tokoh agama untuk mendukung PKB, walau ada juga nilai ekonomi yang didapatkan dari para tokoh politik atau partai.

Dengan demikian, para tokoh politik yang ingin berhubungan dengan masyarakat, khususnya kalangan Santri Tradisional, selalu melalui kyai-nya. Dan apabila tokoh politik itu tidak dapat memberikan kontribusi yang bersifat ekonomi, walaupun kedatangan mereka diterima, namun tidak menjadi dukungan riil dalam pemilu. Sementara di sisi lain masyarakat tidak pernah merasakan kebaikan yang diberikan oleh para anggota dewan dari PKB, dan di sisi lain mereka tahu bahwa para tokoh agama itu mendapatkan sesuatu dari para calon, maka pada akhirnya sedikit demi sedikit banyak dari pemilih

kalangan Santri itu melakukan perlawanan dengan tidak datang ke bilik suara atau memilih banyak partai, dan paling ekstrim mereka mengalihkan pilihan politiknya ke partai lain.¹⁶ Tidak sedikit dari kalangan Santri Tradisional ini dalam pemilu 2004 memilih partai Islam selain PKB, yaitu ke Partai Demokrat, Golkar, atau bahkan PKS.

Hal yang paling sulit bagi kalangan Santri Tradisional untuk mengalihkan pilihan politiknya ke PAN. Berdasarkan hasil temuan lapangan alasan utama sulitnya pemilih Santri Tradisional mendukung PAN adalah dikotomisasi kelompok keagamaan antara NU dan Muhammadiyah, disamping secara sosial dan kultural berbeda dalam kehidupan keseharian di masyarakat.¹⁷ Dalam masyarakat di Malang Raya, eksistensi ritual keagamaan ini telah melembaga dan sekaligus menjadi indikator sosial bagi masyarakat untuk menentukan status sosial ekonomi. Banyak dari masyarakat tidak mampu untuk melakukan khajatan dalam memperingati hari kematian keluarganya, terpaksa mereka mengada-ada dengan cara pinjam tetangga karena takut dikatakan tidak mampu. Mereka sebenarnya tidak mengerti betul bahwa apa yang dilakukan oleh mereka adalah bagian dari kewajiban Islam.

Bagi PDIP yang pada pemilu 2004

¹⁶ Kesadaran pemilih bahwa mereka sering kali hanya dijadikan objek oleh elit (baik itu elit politik maupun elit agama) sudah tumbuh di era pasca reformasi. Oleh karena itu banyak kasus dari tindakan masyarakat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, atau melakukan transaksi dengan partai atau calon berupa imbalan secara ekonomi. Hasil wawancara dengan Mulimin, aktifis NU pada bulan Februari 2008, dan sony simpatisan PDIP pada bulan April 2008 di Dusun Caru Pendem Kota Batu.

¹⁷ Pertentangan antara NU dan Muhammadiyah di tingkat grass root juga dipelihara oleh elit Santri Tradisional untuk memperkokoh solidaritas dan kekompakan kelompok. Pengaruh yang datang dari kelompok Santri Modernis dianggap akan mengancam eksistensi tokoh agama khususnya kyai di masyarakat. Selama ini, tetap berdirinya wibawa kyai di mata masyarakat karena masih adanya ritual keagamaan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan akan selalu melibatkan kyai. Dengan demikian, mau tidak mau, masyarakat akan membutuhkan kyai dari mulai kelahiran, perkawinan, sampai kematian.

mengalami penurunan suara yang sangat tajam, pada dasarnya hampir sama aktivitasnya dalam melakukan pendekatan sosial ekonomi kepada masyarakat. Bahkan PDIP dalam setiap pemilu cukup royal dalam “menjamu” pemilihnya dalam setiap kesempatan kampanye. Berbagai bantuan kepada warga juga diberikan, termasuk untuk kepentingan-kepentingan sosial seperti bantuan perbaikan jalan, jembatan, gorong-gorong seperti yang ada di dusun caru Kota Batu. Di dusun Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang sempat saya survey, PDIP memberikan bantuan berupa pembuatan sumur bor untuk keperluan warga yang membutuhkan air bersih.

Sementara kegagalan PDIP mempertahankan hasil pemilu 1999, menurut salah seorang warga, Agung yang berprofesi sebagai tukang ojek, yang juga merupakan simpatisan PDIP menyatakan bahwa kekalahan PDIP pada pemilu 2004 akibat dari kebijakan Megawati yang ketika menjabat sebagai presiden tidak memperhatikan wong cilik.¹⁸ Pada akhirnya, sebagian pemilih yang mencoblos PDIP pada Pemilu 1999 mengalihkan suaranya ke partai lain, terutama partai baru yang menurut mereka punya harapan untuk perubahan.

Walaupun demikian, sebenarnya suara PDIP menurut banyak pemerhati politik, suara pada pemilu 2004 itu merupakan suara riil dari PDIP. Sementara suara pada pemilu 1999 merupakan suara yang datang dari pemilih yang melakukan Swing Votes. Dan pada pemilu 2004 pemilih Swing Votes PDIP itu kembali lagi ke partainya semula atau mengalihkan pilihan politiknya ke partai lain.¹⁹

¹⁸ Pada saat Megawati menjadi Presiden, di kota-kota, khususnya di Jakarta pada saat Gubernur Sutedjo yang didukung PDIP, banyak terjadi pengusuran lahan maupun penertiban pedagang kaki lima yang nota bene adalah kebanyakan pendukung PDIP.

¹⁹ Pada Tahun 1955 dan pemilu Tahun 1999 ada perbedaan komposisi partai politik, dimana pada pemilu 1955 ada partai “kiri” yang mapan seperti PKI dan PSI, sementara pada pemilu 1999, partai ‘kiri’ yang mapan boleh dibilang absen sama sekali, setelah di-

Kalau dilihat dari data yang ada, pada saat ini konstituen PDIP masih yang terbanyak. Pada pemilu 2004, Kabupaten Malang dan Kota Malang tetap masih dikuasi oleh PDIP. Sementara Kota Batu, selisih suara antara Golkar yang memenangkan pemilu tidak jauh selisihnya dengan PDIP.²⁰ Keberhasilan PDIP mendominasi suara pada setiap pemilu di Malang Raya tidak lepas dari kuatnya kelompok Abangan di Malang Raya. Walaupun Malang Raya terkenal dengan masyarakat religius,²¹ karena banyaknya pesantren dan pendidikan agama, namun sebenarnya sebagian besar masyarakatnya punya kedekatan secara historis dengan Abangan. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Malang Raya walaupun mereka ikut aktivitas ritual keagamaan yang sering dilakukan oleh kelompok Santri Tradisional, namun pilihan politiknya tetap pada partai politik Abangan yaitu PDIP. Tidak

hancurkannya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 dan juga dengan ditekannya Partai Sosialis Indonesia (PSI) oleh Sukarno dan juga Suharto. Lantas kemanakah larinya suara dari partai yang berhaluan “kiri” ini? Kalau dilihat dari hasil perolehan suara, jelas bahwa larinya suara dari partai yang berhaluan kiri ini sebagian besar ke PDIP dan sebagian lagi ke Golkar dan partai lainnya. PDIP yang merupakan kelanjutan sejarah PNI pada pemilu 1955, dimana PNI dalam pemilu 1955 memperoleh suara 22,32 %. Kalau melihat hasil perolehan suara PNI pada pemilu 1955, maka sejatinya perolehan suara PDIP itu berada pada kisaran 20 %. Artinya dalam PDIP ada limpahan suara yang oleh Riwanda (2004) dikatan sebagai Swing Votes, dengan demikian suara PDIP dalam pemilu 1999 bukan merupakan suara riil

²⁰ Hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu 2004 di Malang Raya, bisa dilihat dari hasil rekapitulasi akhir KPU Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu).

²¹ Walaupun demikian, ada ciri khas yang secara garis besar membedakan setiap wilayah yang ada di Malang Raya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh Kecamatan Lawang, Singosari dan Pakis. Lawang mayoritas masyarakatnya mempunyai rasa Nasionalisme yang tinggi, dan pendidikan mereka cukup. Singosari, masyarakatnya religius, umat Muslimnya sangat besar, jadi untuk wilayah ini banyak pondok-pondok pesantren, sekolah atau madrasah Islam dan kegiatannya pun banyak terkait dengan keagamaan seperti pengajian. Sedangkan untuk Pakis, masyarakatnya religius dan Nasionalis, namun masyarakatnya mudah terpecah belah. Hasil observasi pada bulan Agustus 2008.

mengherankan apabila di Jawa Timur banyak Kepala Daerah yang (Bupati/Walikota) yang berasal dari partai PDIP.

Di luar alur identifikasi kepartaian dari kelompok Abangan terhadap PDIP, keberhasilan PDIP mendominasi suara dalam Pemilu, juga karena dilakukannya pendekatan pada masyarakat. Salah seorang tokoh PDIP, yang juga mantan Ketua DPRD Kota Malang menyebutkan bahwa PDIP punya concern yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Walaupun demikian ia mengakui bahwa tidak semua program kepada masyarakat itu dapat direalisasikan dengan baik.

Memberi Bantuan Pembangunan

Dalam rangka membina dan menjaga konstituennya agar tidak lari ke partai lain, para kader partai selalu berusaha melakukan pendekatan-pendekatan yang continue dengan konstituen mereka. Termasuk memberikan sumbangan untuk kepentingan warga dan lingkungan dimana basis partai itu berada. Oleh karena itu banyak partai yang berusaha membantu kebutuhan warga, baik bantuan untuk pembangunan maupun untuk kegiatan. Setiap bantuan ke warga selalu diberikan lewat kader yang sudah punya hubungan dengan anggota dewan dari partai tersebut.

Walaupun demikian, tidak semua partai yang suka memberikan bantuan kepada warga maupun bantuan untuk lingkungan, sebagaimana yang terjadi di Dusun Caru Pendem Kota Batu. Kenyataan tersebut juga terjadi ditempat lain, tepatnya di Daerah Lowokwaru, Kota Malang, ketika saya melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, menyampaikan bahwa yang getol memberi bantuan untuk kepentingan lingkungan di sini ada PDIP, Golkar, P Demokrat, PAN sementara PKB maupun PPP jarang sekali.

Selain memberi bantuan langsung bagi kepentingan warga, banyak para wakil di wilayah Lowokwaru ini memperjuangkan

kepentingan warganya dengan cara menyalurkannya lewat APBD. Bahkan sepertinya para anggota Dewan bersaing agar mereka mendapatkan tempat di hati masyarakat dengan cara memperjuangkan berbagai program pembangunan yang ada di masyarakat agar bisa mendapat simpati dari warga yang diperjuangkan.

Kenyataan tersebut di atas, secara tidak sadar merubah pandangan subyektif dari warga terhadap partai. Partai yang sering memberi bantuan dianggap partai yang baik, sementara partai yang jarang memberi bantuan dianggap partai yang jelek. Partai selalu dimaknai dengan sumber bantuan untuk pembangunan, dan hal ini sangat terasa dalam kehidupan politik sekarang, khususnya yang terjadi di akar rumput. Menurut, warga yang sempat saya wawancarai, agar para pemilih tetap memilih partai tersebut, maka partai dan pemilih itu harus ada ikatan bathin.²² Ikatan batin itu diwujudkan dalam bentuk bantuan kongkrit kepada masyarakat seperti pembangunan Mushola, Gorong-gorong, saluran air agar masyarakat tahu dan ingat bahwa partai ini telah menyumbang ini dan itu pada lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tensi persaingan yang sangat tinggi telah mendorong partai/caleg berusaha dengan segala cara untuk meraih simpati massa. Kondisi ini telah mendorong partai/caleg melakukan banyak aktivitas yang lebih mirip pembelian suara (vote buying) seperti bantuan pembangunan buat lingkungan, pemberian barang dan layanan social, bahkan pemberian uang. Kondisi ini berdampak pada pada perilaku partai maupun anggota dewan yang terpilih dalam menjalankan tugasnya. Partai politik yang mendapat bantuan berupa dana parpol, dalam penggunaannya banyak yang sulit dipertanggungjawabkan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan

²² Wawancara tidak terstruktur dengan salah seorang warga di wilayah Karang Ploso, yang berprofesi sebagai tukang tambal ban, pada bulan Desember 2008.

ketentuan. Lebih jauh dana parpol tersebut banyak yang menjadi rebutan, diantara pengurus maupun parpol yang merasa berhak. Sementara anggota dewan, dengan pengeluaran dana kampanye yang besar, maka mereka berusaha untuk mencari tambahan dana. Kondisi ini mendorong terjadinya *abuse of power* dalam pembuata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian (1989) *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Homewood, Ill,: Dorsey Press.
- Azra, Azyumardi, (2002) *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- , dkk. (2004) *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Fathoni, Khoerul and Zen, Muhammad (1992) *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwwah dengan Muhammadiyah*. Yogyakarta : Media Widya Mandala.
- Fealy, Greg (2003) *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LP3ES.
- Feith, H., (1970) "Introduction". In Feith and Castle, Lance ed. *Indonesian Political Thinking, 1945–1965*. Ithaca : Cornell University Press.
- , (1978) *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press.
- , (1957) *Indonesian Elections of 1955*, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Ithaca, New York: Cornell University.
- Hagopian, N., Mark (1978) *Regime, Movements and Ideologies*, New York and London: The University of Chicago Press.
- Hammond, J.L., (1979) *The Politics of Benevolence: Revival Religion and American Voting Behaviour*. Norwood : Ablex Publishing Corporation.
- Kazhim, M. dan Alfian Hamzah, (1999) *Lima Partai Dalam Timbangan*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Lazarsfeld, Paul, Berbard Berelso, and Hazel Gaudet, (1944) *The People Choice*. New York: Columbia University Press.
- , (1962) *Political Ideology*. New York: The Free Press.
- , (1969) *Political Thinking and Consciousness*. Chicago: Markham Publishing.
- Lev, S. D., (1966) *The Transition to Guide Democracy: Indonesian Politcs, 1957-1959*, Monograph Series, Modern Indonesian Project, New York: Cornell University.
- Liddle, W.R., (1978) *Participation and the Political Parties*. In Jackson, Karl D and Pye, Lucian ed. *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley : University of California Press.
- , (1978) *The 1977 Indonesia Election anf New Orde Legitimasy, Southeast Asian Affair* (Singapura: Institute for Southeast Asia Affair Asia Studies, 1978.a)
- , (1974) "Power, Participation and The Political Party in Indonesia", Center for International Studies, MIT.
- , 1992. "Sungai Budaya. Tempo. 12 April.
- Mair, Peter., et.al. (2004) *Political Party and Electoral Change*, London: SAGE Publications Ltd.
- , Cleavages, dalam Ricard S Katz and William Crotty , (edt), 2006, *Hand Books of Party Politics*, Calipornia: SAGE Publication.
- Majid, Nurcholis (1996) *Ketegangan Kultur Pesisir dan Kultur Pedalaman (Menelusuri Kultur Politik Orde Baru)*, Jakarta: Yayasan Lintas Informasi.
- Noer, Deliar (1980) *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.

- , (2006) Partai Islam di Pentas Nasional, Cet. I, Bandung: Mizan.
- Nurjaman, Asep, (1998) Kepolitikan Orde Baru Dalam Prespektif Struktural Dan Kultural, Malang: UMM Press.
- Pomper, Gerald, (1966) Politics: Essay and Reading, USA: Rinehart and Winston, Inc.
- , (1975) Voter's Choice: Varieties of American Electoral Behavior. New York: Dodd, Med Company.
- Samson, Allan A. (1978) Conception of Politics, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian Islam. In Jackson, Karl D and Pye, Lucian ed. Political Power and Communication in Indonesia. Berkeley : University of California Press.
- Sartori, Geovanni, (1959) Parties and Party System, A Framework for Analysis. New York: Cambridge University Press.
- Schwarz, Adam (1994) Nation in Waiting, Austalia: Allen & Unwin Pty Ltd.
- Smith, D.E. (1971) Religion, Politics, and Social Change in the Third World. New York: Free Press.
- Suhardjo, Achmad (1991) Kemerostan Perolehan Suara PPP Pada Pemilu 1987, Studi Kasus di Kabupaten Jombang. Unpublished MA Thesis, Gadjahmada University, Yogyakarta .
- Sukamto, (1992) Kepemimpinan Kiai dan Kelembagaan Pondok Pesantren. Unpublished MA Thesis, Gadjahmada University, Yogyakarta .
- Surbakti, Ramlan, (1992) Memahami Ilmu Politik. Indonesia: Gramedia Widya Sarana.
- Sulistyo, Hermawan, (2000) Palu Arit Di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Syamsuddin, D. (editor). (1990) Muhammadiyah Kini dan Esok, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Thohari, Hajriyanto Y., (2002) Kepemimpinan Nasinal, Antara Primodialisme dan Akuntabilitas, dalam Maruto MD dan Anwar WMK, (editor), Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Waltzer, Herbert (dkk) (1971) Ideologies And Modern Politics, Toronto USA: Dodd, Mead & Company.